

Bab III

Masa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra

A. Masa Pemerintahan Yingluck tahun 2011-2013

Pemilu pada 3 Juli 2011, Partai Pheu Thai memenangkan suara dengan mendapatkan sekitar 3-4 juta suara lebih banyak di banding Partai Kekuatan Rakyat dalam pemilihan 23 Desember 2007. Partai Demokrat memperoleh hampir kurang lebih 1 juta suara . Hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa perubahan telah terjadi didalam masyarakat politik Thailand dengan polarisasi regional yang sangat berbeda. Perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa Partai Pheu Thai memperoleh suatu kemenangan telak di wilayah Utara dan Timur laut sedangkan Partai Demokrat jelas di dukung dari Selatan. Jumlah suara yang mendapatkan kemenangan menunjukan bahwa Thailand dituntut untuk mempertimbangkan dan memfokuskan perhatiannya kepada masing-masing poiltil di daerah dengan karakteristik atau identitas berbeda. Identitas dapat diatribusikan hingga beragam faktor pendukung mulai dari Topografi, iklim ,hubungan ekonomi dengan daerah lainnya, budaya dan persepi yang berbeda⁵⁰. Pada bulan Juli 2011 Partai Pheu Thai (PTP) yang di pimpin oleh Thaksin Shinawatra Jumlah Partisipasi pemilih pada saat itu mencapai rekor tertinggi sekitar 75 persen .

⁵⁰ .Chaisukkosol.A New Sosial Contract: The way out for Thailand'S Political Transformation Crisis.Friendrich Ebert Stiftung .

Perolehan tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah pemilihan umum Thailand . Di pemerintahan Thailand terdapat 300 kursi tersebut akan menjadi beberapa koalisi yang terdiri dari enam partai antara lain Pheu Thai ,Chaithaipattana (Pembangunan Nasional Thailand), Chon Chon , Mahachon, dan New Democracy .

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum berjumlah sekitar 75 persen , surat suara tidak sah mencapai 4.9 persen dan 2,7 persen pemilih yang berhak untuk tidak memilih partai apapun . Terdapat juga pemilihan di bawah basis konstituen single member dengan jumlah pemilih sekitar 74,85 persen ,5,79 persen surat suara tidak sah dan 4 persen menandai kotak “ Tanpa Suara”. Komisi pemilihan menyatakan seandainya tidak terdapat keluhan suatu kecurangan saat pemungutan suara itu akan mengesahkan hasil untuk semua kandidat pada 12 juli. Yingluck Shinawatra didukung sebagai calon perdana menteri pada 10 Agustus 2011. Dalam kampanyenya Yingluck banyak menjanjikan adanya platform kebijakan populis dari era Thaksin antara lain subsidi tanaman untuk petani , kenaikan upah minimum, pengadaan komputer tablet di tiap sekolah . Namun setelah terjadinya banjir sangat dahsyat di tahun 2011 yang menewaskan lebih dari 600 jiwa dan mengalami kerusakan hingga miliaran. Pemerintah Yingluck pun harus mengalihkan sumber daya untuk fokus dalam rangka pemulihan dan terutama mendorong kembali adanya penerapan upah minimum hingga bulan April 2012. Yingluck Shinawatra juga mengatakan bahwa dalam pemerintah baru tersebut akan maju terus dengan adanya

rekonsiliasi sebagai prioritas pertama sementara komisi kebenaran yang di pimpin oleh Dr. Kanit Na Nakorn untuk melanjutkan pekerjaannya . Dr Kanit juga menegaskan bahwa Pheu Thai tidak akan memberikan amnesti untuk tiap orang . Meskipun hal tersebut Yingluck beserta Koalisi pemerintahannya dapat menikmati mandat politik yang kuat dengan adanya ketegangan politik . Isu yang dapat menyebabkan terpecah belahnya berkaitan dengan adanya potensi kembalinya mantan perdana menteri Thaksin . Thaksin Shinawatra sempat menjadi pemimpin Pheu Thai dan memerintah negara Thailand berkali – kali hampir separuh tahun 2011.

Perdana menteri Yingluck Shinawatra mengabaikan sebuah spekulasi bahwasanya ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pada Desember 2011 sebuah partai oposisi yang utama di Thailand yaitu Partai Demokrat bahwa akan mengumumkan pemilihan berencana guna mengajukan proses impeachment terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan Menteri Surapong Tovichakchaikul . Para Perdana menteri dan menteri tersebut yang dipermasalahkan untuk Partai Demokrat yaitu sebuah keputusan asing oleh Menteri Surapong Tovichakchaikul guna menerbitkan kembali paspor demi menggulingkan mantan perdana Menteri Thaksin Shinawatra . Thaksin juga tunduk terhadap daftar panjang korupsi lainnya. Setelah beberapa tahun kemudian pihak oposisi menentang keputusan pemerintahan baru yang jelas bersekutu dengan mantan perdana menteri guna menerbitkan kembali paspornya milik Thaksin Shinawatra . Menurut Wirat Kalayasiri pemimpin dari tim

hukum milik Partai Demokrat bahwa akan ada penjahat yang diajukan kepada menteri luar negeri dikarenakan adanya kelalaian suatu tugas . Menteri luar negeri Surapong Tovichakchaikul mengatakan tidak cukup kriteria untuk membenarkan penahan paspor milik mantan Perdana menteri Thaksin Shinawatra⁵¹ .

Dalam kampanyenya itu Yingluck mampu memanfaatkan situasi atas kekhawatiran ekonomi yang sedang berkembang. Yingluck berjanji akan menghidupkan kembali kebijakan populis di era Thaksin Shinawatra . Kebijakan populis itu ditunjukkan bagi pemilih yang berpenghasilan rendah . Thaksin sebagai perdana menteri berhasil dalam memenangkan beberapa sektor di pedesaan bagian utara dan timur laut melalui dana usaha mikro serta program perawatan kesehatan universal . Yingluck selaku perdana menteri dan adek dari Thaksin berjanji untuk dapat memulihkan subsidi pemerintah sebelumnya untuk beras di bawah yang di sebut dengan “ Hipotek beras”. Hipotek beras merupakan sebuah program dimana pemerintahan membeli beras dari petani di abovemarket lalu menjualnya di pasar terbuka guna menarik kaum urban miskin . Yingluck berjanji untuk menaikkan upah minimum . kedua kebijakan tersebut dapat menciptakan kekhawatiran di komunitas teknokrat dan bisnis di Thailand . Perekonomi takut akan program gadai beras akan membuat harga beras terlampaui tinggi di pasar global . Komunitas

⁵¹ . “ Thailand Country Review “ diakses dari <http://www.countrywatch.com> pada 10 Agustus 2018 pukul 19.00.

bisnis pun menolak atas kebijakan yaitu menaikkan upah minimum dikarenakan menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja tetap muncul kekhawatiran lain yaitu dapat memacu inflasi lebih lanjut⁵². Pemerintahan yang di pimpin oleh Yingluck Shinawatra memperkenalkan suatu kebijakan populis baru. Kebijakan tersebut berorientasi pada Thaksin yang sangat populer di kalangan orang miskin di negara Thailand. Di bawah pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra sekaligus saudara dari Thaksin Shinawatra. Kebijakan Thaksin seperti skema kartu kesehatan 30 baht dan OTOP (One Tambon One Product) mempunyai manfaat bagi masyarakat secara luas yang berpenghasilan rendah. Berbeda dengan saudaranya tersebut Yingluck memberlakukan kebijakan baru yaitu mendistribusikan kekayaan dari pembayar pajak untuk mempersempit kelompok kepentingan khusus dan bukan orang miskin⁵³.

Beras merupakan produk pertanian yang sangat penting bagi masyarakat Thailand. Beras juga menjadi produk utama yang di ekspor selama satu dekade. Ekspor beras mencapai rekor 9,00 juta di tahun 2011 ketika Thailand memasok 28,79 % lebih dari negara lain.

⁵² Dalpino, Catharin. 2012. Thailand in 2011 High Tides and Political Tension. Asian Survey. University of California press. Vol 52. No 1. hal 196.

⁵³. War, Peter. 2013. The Changing face of Thai populism. East Asia Forum.

Table 3.1
Ekspor Beras tahun 2010-2011

Negara	2010	2011	Pasar di 2011 (%)
China	0.600	0.900	2.97
India	2.200	2.500	7.45
Pakistan	3.800	2.650	12.87
Vietnam	6.200	5.800	21.00
U.S.	3.525	3.550	11.85
Thailand	8.500	9.000	28.79

Beras tetap menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat Thailand seperti di beberapa negara Asia lainnya. Kebijakan terkait beras diajukan oleh seorang politisi yang mempunyai pengaruh dalam pemilu periode 2010-2011. Selama periode tersebut perdana menteri Apisit Vejchashiva mengeluarkan sebuah *“kebijakan penghasilan penghasilan”* untuk beras⁵⁴. Thailand adalah Negara pengekspor beras terbesar di dunia dengan volume eksportnya menduduki peringkat pertama untuk waktu tiga dekade sejak 1982 dan menyumbang 30 persen pada perdagangan beras dunia antara tahun 2003-2007. Peringkat Thailand pun mengalahkan India dan Vietnam

⁵⁴ . Poramacom, Nongnooch. 2014. Rice production, prices and Related Policy in Thailand. International journal of business and Social Science. Bangkok .

jauh di belakangnya . Pasar ekspor beras pun tidak hanya terbatas di negara Asia tetapi juga di sebagian sekitar 40% masuk ke Afrika , Eropa , Amerika latin dan Oseania. Thailand terdapat berbagai varietas beras baik dari segi jenis yaitu nasi wangi, putih dan beras pratanak . Saat ini Thailand dapat menghemat produksi untuk ekspor sekitar setengah dari berasnya , hal itu sangat luar biasa di antara negara yang menanam padi sebagai bahan pokok .Namun dalam hal perekonomian nasionalnya sendiri industri beras tidak menjadi sektor utama.Dalam produksinya saja hanya dapat menghasilkan 2 % dari total nilai yang di tambahkan pada tahun 2000 dan turun dari 13 % di tahun 2008. Terdapat bea ekspor yang disebut dengan premium beras dengan memberikan 10 % dari pendapatan pemerintah sampai tahun 1960an tetapi sekarang industri beras menerima subsidi pemerintah⁵⁵ .

Thailand mengenakan pajak ekspor terhadap berasnya sampai tahun 1986 tetapi denganmempertahankan kebijakan perdagangan beras . Kebijakan perdagangan beras tersebut sangat liberal karena membatalkan pajak tanpa adanya subsidi atau suatu perlindungan yang signifikan di awal tahun 2000an. Program penanaman padi tersebut meskipun sudah di berlakukan pada tahun 1980an guna membiarkan petani mendapatkan manfaat dari pinjaman ketika harga pasar rendah .Pinjaman tersebut tidak menjadi faktor pendukung suatu harga .Petani di

⁵⁵ . Shigetomi,Shinichi .2011.The World Food Crisis and strategies of Asian Rice Exporters.

haruskan untuk menanam padi mereka dengan pemerintah selama musim panen . Saat musim panen padi tiba dan harganya rendah maka akan mendapatkan pinjaman yang setara dengan 80% dari target tertentu sebagai bentuk imbalan . Ketika harga kembali sesuai dengan target maka petani dapat membayar pinjaman tersebut dengan bunga 3 % dan menembus sawah milik mereka . Tetapi dalam kasus serupa ketika harga pasar tidak sesuai maka petani dapat memilih untuk menyimpan uang mereka secara tunai dan tidak menembus beras . Melihat program penanaman padi terdapat beberapa perubahan mendasar di tahun 2001 setelah Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri. Masa Thaksin Shinawatra alih-alih hanya memberikan pinjaman dengan tujuan yaitu diubah guna mendukung harga dan meningkatkan pendapatan dari petani padi tersebut. Sebelum pemerintahan Thaksin petani hanya dapat meminjam hingga 95% dari target harga tetapi ini dinaikan menjadi 100% . Program penyerahan padi tersebut dihidupkan kembali sebanyak dua kali oleh Partai politik pro Thaksin (Partai Pheu Thai) yang pertama pada tahun 2008 setelah krisis harga beras dan kedua ketika saudara perempuan Thaksin yaitu Yingluck Shinawatra menjabat menjadi Perdana Menteri.

Ketika menjadi Perdana Menteri Yingluck mengambil kembali kebijakan tersebut secara ekstrem guna memenangkan pemilu tahun 2011. Yingluck mengambil kembali kebijakan tersebut dan berjanji terhadap program tersebut . Selama periode 2011-2012 perdana menteri Yingluck Shinawatra mengeluarkan sebuah “kebijakan

Berikutnya Beras” dimana pemerintah mengumumkan rencana untuk membeli beras dari petani di atas harga pasar. Skema tersebut di gambarkan guna memenangkan suara .Pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut dimulai pada tahap pembelian dari bulan Oktober 2011 – Februari 2012 . Para ekonom juga memperingatkan bahwa program tersebut kurang kompetitif . Namun menurut pemerintah Thailand bahwasannya skema tersebut sebagai cara untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan bagi para petani dan membantu mendorong harga ⁵⁶ . Pemerintah Yingluck membeli beras yang besar dan harga mahal tetapi menunggu harga naik sebelum menjualnya kembali agar menghindari dari kerugian . Thailand kalah dari negara India dengan posisinya sebagai eksportir diatas dan di lampui oleh Vietnam .Thailand pada akhirnya hanya menempati posisi ketiga untuk eksportir beras terbesar

. Program penanaman padi tersebut menelan dana dari pemerintahan sekitar THB 376 miliar atau sebesar USD 12,5 Miliar untuk awal bulan oktober 2011. Dana pemerinthan tersebut hanpir setara dengan 3,4 % dari produk domestik bruto . Stok beras yang di jual mengalami kerugian sekitar sepertiga dari biaya ini tidak pernah kembali⁵⁷ .

⁵⁶.Poramacom,Nongnooch.2014.Rice production,prices and Related Policy in Thailand.International journal of business and Social Science.Bangkok

⁵⁷ Fang,Arnold H.2016.Lingkage between Rural voters and politicians:Effects on Rice policies in the philippines and Thailand . Asia&the pacific policy studies.Australia.hal 508-509.

Kebijakan beras dari pemerintahan Thailand telah memicu perdebatan mengenai strategi untuk mencapai program ketahanan pangan khususnya di wilayah Asia. Skema kebijakan tersebut yaitu Buffer stock standar yang melibatkan pemerintah membeli dan menimbun komoditas ketika harga rendah lalu menjualnya dengan harga tinggi . Cara tersebut menyebabkan pemerintahan tidak hanya menstabilkan harga tetapi juga menghasilkan laba spekulatif jika selisih dapat mencukupi guna menutupi biaya penyimpanan . Kebijakan Thailand tampaknya di tunjukan untuk menaikkan harga global dengan menghapus jumlah pasokan dari pasar global sementara . Perdana menteri Yingluck Shinawatra di tuduh mencoba “memanipulasi pasar beras global dengan cara membeli persediaan” . Skema dari pemenuhan beras oleh pemerintah adalah membayar sebanyak 50% diatas harga tanpa adanya batasan jumlah stoc . Hal ini menjadikan pemerint sebagai pembeli beras terbesar . Namun jumlah penyimpanan beras di pemerintahan hanya terbatas dan pabrik pun di sewan untuk menyimpan stok beras . Secara resmi skema ini di luar anggaran dan didanai oleh Bank pertanian dan koperasi pertanian milik negara (BAAC).

Ketika program tersebut pertama kali diluncurkan di tahun 2011 , saat harga tertinggi disitulah pemerintah membeli beras dari petani negara dengan harga 15.000 Baht (nasi putih) hingga 20.000 Baht (padi harum) atau \$ 486 per ton sekitar 50% lebih tinggi dari harga pasar global. Stok beras di Thailand sekitar 30 juta ton pemerintah mengeluarkan biaya tambahan sebesar \$7,8 miliar dengan harapan dapat

menutup pengeluaran . Menutup pengeluaran tersebut dapat dilakukan yaitu menjual gandum dengan harga yang meningkatkan penyampaian program di tahun 2011/2012 dan melibatkan sekitar 1,3 juta rumah tangga petani padi dari jumlah total 3,6 juta di negara Thailand . Peserta rumah tangga ini dari pertanian kecil hingga menengah . Program paddy Pledging diperkirakan akan menyebabkan kerugian sekitar 1 % dari GDP program 2011/2012 dan tahun 2012/2013 sebesar 1,2 % dari PDB ⁵⁸ . Program kebijakan baru ini berasal dari skema pembelian beras pada sebelumnya dikarenakan harga yang mahal serta gagal untuk menetapkan batas pembelian pemerintah. Kebijakan tersebut telah membuat pemerintah sebagai pedagang beras terbesar di dunia itu dalam semalam mereka menangani hampir seluruh surplus beras yang akan di pasarkan di negara Thailand. Kebijakan itu berdampak di tahun 2011 ketika terjadi banjir saat itu menyebabkan tanaman padi rusak. Pada tahun 2011 jumlah pasokan beras yang berada di tempat penyimpanan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 12,5 juta ton . Potensi kerugian yang di capai bagi pemerintah dapat mencapai 5 persen dari GDP negara Thailand. Berbagai upaya untuk mengurangi pembatasan beras telah di rencanakan agar biaya tetap terkendali . Selain meningkatkan biaya terdapat masalah lain yaitu

⁵⁸ . Permani.Risti;David vanzenti.2014.Rice mountain : Assessment of the Thai rice pledging program.Australian Agricultural & resource economics society.Australia.hal : 2.

adanya korupsi⁵⁹. Pertimbangan kebijakan saat kampanye mengenai penanaman padi dengan melalui skema ini pemerintahan Pheu Thai akan membeli hampir seluruh beras dari petani dengan harga paling sedikit 50 persen lebih tinggi dibanding harga pasar. Biaya fiskal diperkirakan sangat tinggi kemungkinan akan menjadi yang tertinggi di antara semua kebijakan Pheu Thai . Adanya kebijakan tersebut tidak benar akan membawa keuntungan bagi para petani . Skema kebijakan ini di beruntukkan kepada petani dan diantara petani kaya akan mendapatkan manfaat cukup besar. Sebagian besar manfaatnya di berikan kepada penggilingan padi ,eksportir beras dan politisi serta birokrat yang korupsi . Subsidi pajak mobil pertama serta rumah pertama pun tidak jelas soal redistributifnya . Hanya sekitar 25 persen keluarga terkaya di Thailand yang mampu membeli mobil dan kebanyakan dari mereka mempunyai mobil bekas lebih murah. Bahkan lebih sedikit keluarga yang mampu membeli rumah dengan bangunan baru . Kebijakan ini sangat menguntungkan bagi kaum kaya serta pengusaha dari dua industri yang terlibat dalam permasalahan ini . Kredit pajak terkait besarannya sekitar 100.000 baht untuk skema skema mobil pertama dan 500.00 baht subsidi rumah pertama . Adanya kredit mengenai pajak tersebut membuat kebijakan in

⁵⁹. Vikram Nehru, Carnegie Endowment ” Thailand’s rice policy gets sticky” diakses dari carnegieendowment.org pada 20 Agustus 2018 pukul 08.00

lebih buruk dalam mengurangi ketidaksetaraan⁶⁰.

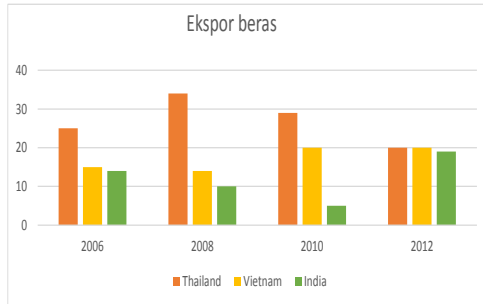
Biayapengikatan ,penyimpanan ,penggilingan,biaya operasi dan bunga di bayar oleh pemerintah. Petani yang terdaftar dalam program itu dapat mengirimkan padinya ke pabrik yang di tunjuk , ada sekitar 2.000 diantaranya diseluruh negeri. Setelah mengirimkan padi tersebut para petani akan mendapatkan kwitansi yang nantinya akan mereka bawa ke Bank untuk hal pertanian serta koperasi pertanian (BAAC) untuk mengklaim pembayaran .Pembayaran akan tergantung pada tingkat dan kelembapan sebuah sawah sesuai dengan ketentuan pabrik .Penggilingan padi akan di lakukan oleh pemerintah guna menggiling sawah lalu mengirim beras yang sudah di giling ke pemerintah dalam waktu 7 hari karena kapasitas penyimpanan publik sangat terbatas .

Pada akhir November ketika Partai Demokrat sedang mengajukan suara tidak percayanya parlemen terhadap Yingluck Shin awatra dan menuduh penyalahgunaan suatu program serta kurangnya transparansi . Pemerintah Thailand telah menjamin bahwa mosi tidak percaya tetapi oposisi baru akan mengajukan petisi kepada lembaga independen anti korupsi guna menyelidiki dugaan yang menyimpang tata kelola terkait program tersebut . Meskipun beberapa hal mengalami stabilisasi sejak pemilihan Yingluck Shinawatra tetapi resiko ketidakstabilan politik masih

⁶⁰ Somchai Jitsuchon,," Fiscal cost and Thailand's redistribution policies" diakses dari <http://www.eastasiaforum.org> pada 27 Juli 2018 pukul 01.51

menjadi masalah utama bagi negara Thailand . Pada akhir 2011 ketegangan di hidupkan kembali manajemen krisis banjir oleh pemerintah dan kurangnya pengalaman Yingluck Shinwatra dalam menangani situasi darurat seperti itu . Ketegangan politik juga tetap fokus terhadap isu-isu politik “tradisional”.

Pemerintahan Yingluck pun mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar petani dengan harga yang sudah dijanjikan sebelum pemilihan umum tahun 2011. Meskipun hal itu mendorong para petani untuk membawa masalah ini ke jalan-jalan (demonstrasi) selain itu membawa dampak buruk terhadap kelas menengah di perkotaan dan menyebabkan mereka terlibat dalam protes tersebut . Program tersebut banyak menuai kritikan , pertama terbukti kontroversial karena adanya dampak negatif pada ekspor komoditi negara . Penurunan harga beras telah memaksa pemerintah untuk membeli banyak beras menunggu akan kenaikan harga global mengakibatkan ekspor mengalami penurunan sebesar 40% di tahun 2012. Mengurangi pangsa pasar negara maka dari 30% rata-rata di dalam waktu 5 tahun terakhir hingga 20 % di tahun 2012.



Grafik 3.2

Grafik tersebut menjelas pertumbuhan ekspor beras di tahun 2006,2008,2010 dan 2012 dengan negara Thailand ,Vietnam dan India . Ekspor beras dari Thailand paling unggul di banding negara lainnya dan di Tahun 2008 berjumlah 34 % kenaikan yang cukup bagus . Selain itu Bank Dunia juga memperkirakan harga beras sekitar USD 500- 520/ton dalam waktu 5 tahun kedepan sedangkan USD 200 berada di bawah patokan jaminan untuk basi Thailand . Oleh karena itu pemerintah akan terus meningkatkan Stock beras atau mengubah strateginya . Berdasarkan pemikiran Bank Dunia kerugian akibat program tersebut di poyeksikan atau mewakili sekitar 1% dari PDB untuk tahun 2011/2012 dan 1,2% untuk 2012/2013 terakhir. Program ini tidak hanya mengalami kerugian saja tetapi bisa juga menambah keributan politik . Program dukungan harga beras murah dari pemerintah yaitu bagian dari program stimulus guna memenuhi janji – janji pra pemilihan dan mendukung pemulihan pasca banjir . Beberapa mengkritik fakta bahwa petani termiskin tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut dikarenakan kapasitas produksi mereka .

Kapasitas produksi para petani tidak sesuai dengan ruang lingkup program . Pada Juni 2012 ketegangan politik dihidupkan kembali oleh upaya pemerintah guna meloloskan undang-undang untuk mengamandemen konstitusi 2007 . Rencana pemerintah untuk memulai kembali Rancangan undang-undang (RUU) amandemen konstitusi yang kontroversial dan membentuk majelis penyusunan konstitusi dapat memicu adanya protes anti pemerintah dalam waktu beberapa bulan mendatang.

Pada bulan Februari 2012 Partai Oposisi Demokrat terus mendorong guna mencoba melakukan impeach terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra . Saat ini partai oposisi itu tengah membidik kepala pemerintahan terpilih secara demokratis selama berlangsungnya pertemuan dengan pengusaha properti . Di akhir bulan Februari parlemen Thailand menyetujui tiga amandemen charter yang secara efektif membuka jalan bagi suatu perubahan kontroversial di negara ini berupa sebuah konstitusi pasca terjadinya peristiwa kudeta . Dengan adanya perubahan konstitusi yang telah di setujui maka para parlemen ditugaskan untuk mempersiapkan pembacaan suatu rancangan dan di harapkan anggota komite menyertakan perwakilan dari Partai Pheu Thai yang sedang berkuasa serta kekuatan oposisi terbesar di negara Thailand. Partai Demokrat jugalah mempermasalahkan adanya perubahan kunci pada konstitusi

kontroversial yang diumumkan di tahun 2007 setelah peristiwa kudeta militer⁶¹.

Pada tahun 2013-2014 skema kebijakan tersebut di rancang guna memperdayakan petani padi secara finansial tetapi hal tersebut malah melemahkan nilai kompetitif beras Thailand dan dianggap sebagai bentuk korupsi. Pemerintahan Yingluck pun sempat merubah konstitusi guna memperkuat cabang eksekutif dan legislatif yang berhadapan dengan pengadilan saat pengampunan mantan perdana menteri Thaksin atas hukumannya. Akhirnya pada tahun 2013 Partai Pheu Thai hampir berhasil menggunakan mayoritas legislatif untuk mengeluarkan amnesti selimut. Amnesti selimut itu digunakan untuk melakukan tindakan korupsi dan kejahatan terhadap politik yang terjadi pada tahun 2005-2010. Setahun terakhir pemerintahan Yingluck memperkenalkan RUU amnesti dalam upayanya untuk mengakhiri polarisasi yang sedang melanda negara Thailand. Amnesti tersebut di berikan kepada orang-orang yang berada di spektrum politik termasuk Dr Thaksin. Tagihan dari amnesti tersebut menyebabkan marahnya orang-orang yang menentang Thaksin dan terjadi demonstrasi di penjurukota Bangkok. Demonstrasi melibatkan ribuan pemrotes dan akhirnya Yingluck sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang serius. Yingluck meminta dukungan guna undang-undang tersebut dan di tolak oleh negara Thailand.

⁶¹ . “ Thailand review 2018” diakses dari <http://www.countrywatch.com> pada 9 Agustus 2018 pukul 09.00.

Selama dua tahun terakhir sebagian besar kondisi mengalami kestabilan kemungkinan krisis baru tidak pernah di kesampingkan . Partai oposisi yang didukung oleh elit dan dan orang – orang Thailand di bagian selatan melakukan penarikan legitimasi dari lembaga Tradisional. Lembaga tradisional tersebut terdiri dari monarki,militer dan berbagai lembaga lainnya . Suthep dan para pendukungnya telah menuduh bahwasannya partai yang sedang berkuasa (Partai Pheu Thai) membeli suara , Tidak etis dan kebijakan populis guna memenangkan pemilu tahun 2011. Menurut para aliansi pasukan oposisi tersebut di kelompokkan di bawah bendera aliansi rakyat untuk Partai Demokrasi . Yingluck Shinawatra merupakan boneka Thaksin yang mana bekerja semata-mata hanya untuk memastikan kepulangan dari tempat pengasingannya di Dubai . Thaksin pun tetap tinggal disana guna menghindari dari hukuman penjara karena melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan . Hampir semua tindakan di lakukan oleh pemerintah ada suatu unsur yang memungkinkan memfasilitasi kembalinya Thaksin Shinawatra pada Agustus 2013. Kembalinya Thaksin Shinawatra dari pengasingannya ketika pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan pelanggaran politik sejak kudeta 2006. Rancangan undang-undangan itu disajikan sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi rekonsiliasi politik yang terbagi-bagi di negara Thailand . Pada Juli 2013 pemerintah Thailand mengusulkan pembentukan kembali Senat yang dipilih secara

keseluruhan untuk menggantikan yang sebagian dipilih dan ditunjuk . Pada 6 November setelah perubahan yang disetujui oleh DPR maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa proposal itu tidak konstitusional karena berusaha untuk menggulingkan rezim demokratik pemerintah dengan kepala negara yaitu Raja .

Pada awalnya mengesampingkan para pemimpin politik seperti Thaksin dan Tokoh oposisi yang lainnya termasuk mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva (kepala Partai Demokrat) dan Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban. Suthep Thaugsuban merupakan mantan perdana menteri yang menyetujui tindakan keras pada bulan Mei 2010 namun setelah RUU amnesti disetujui oleh Dewan Perwakilan Thailand. Pemerintah pun mengusulkan rancangan baru yang akan mengampuni semua pemimpin politik di Thailand . Sementara untuk partai yang sedang berkuasa memberikan pendapat bahwa ini merupakan langkah menuju damai lebih lanjut dan banyak pihak dari oposisi menyakini adanya perubahan yang dirancang untuk mengizinkan Thaksin pulang tanpa menjalani masa hukuman. Rancangan undang-undang (RUU) yang dimodifikasi itu juga akan mengampuni banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan puluhan ribu kasus korupsi di Thailand. Yingluck pun menarik dukungan untuk sebuah proposal yang kontroversial setelah senat menolaknya.

Skema penanaman padi ini merupakan program unggulan milik Partai Pheu Thai yang menariknya mendapatkan dukungan besar

dari warga pedesaan di bagian utara dan timur laut negara itu . Pada akhirnya skema tersebut kandas di awal 2014 setelah mengumpulkan lebih dari 17 juta ton stock beras selama kurun waktu 3 tahun . Hal itu mengundang kemarahan kelas menengah bahwa pajak mereka merasa di sia-siakan di dalam skema “populis” . Menurut Panada Disakul merupakan seorang menteri mengatakan bahwa komite akan mencari fakta terkait perhitungan yang menyebabkan kerugian ekonomi senilai 286,6 miliar baht (S \$ 11 miliar). Tahun Yingluck secara retrokatif di berhentikan oleh lembaga legislatif yang ditunjuk militer yaitu dengan melarangnya dari politik dalam kurun waktu selama lima tahun . Sektor pertanian di Thailand mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun yang mana di bawah kekuasaan militer. Penurunan pada sektor petani disebabkan adanya harga komoditas yang lemah serta cuaca kering dan merasa terbebani dengan hutang maka mereka terpaksa menjual tanah . Menurut Kementrian Perdagangan bahwa mereka siap menghabiskan dana sekitar 3,9 miliar baht hanya untuk membeli beras selama musim panen mulai bulan November guna menopang harga⁶² .

B. Kudeta militer dan penggulingan Yingluck

Demonstrasi politik dimulai sejak awal November 2013. Pada akhir November 2013 negara Thailand menghadapi sebuah ketegangan politik yang mana ketika puluhan ribu pendemonstran anti pemerintahan

⁶². Tan hui yee. ” Yingluck in court over rice pledging scheme” diakses dari <https://www.straitstimes.com> pada 26 Agustus 2018 pukul 02.00

memenuhi pusat kota Bangkok guna menekan pemerintah untuk melakukan pengunduran diri. Para demonstran anti pemerintahan itu berbaris di depan gedung-gedung pemerintah dan di perkirakan berjumlah sekitar 100.000 orang meminta pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra untuk mengundurkan diri. Para demonstran juga menuntut untuk merobak secara keseluruhan serta mencabut segala sesuatu yang berhubungan dengan Thaksin Shinawatra. Mayoritas para pendemonstran terjadi disekitar fasilitas pemerintah dan di persimpangan jalan utama termasuk Taman Lumpini , Sala Daeng, Asoke , Ratchaprasong , Pathumwan dan pusat pemerintahn di Chaengwattana .Pihak polisi mengizinkan para demonstran melakukan hal itu dan mereka juga tidak berniat menggunakan kekuatan untuk mencoba melawan guna menghindari terjadinya kekerasan seperti delapan tahun lalu tepatnya ketika kudeta perdana menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan oleh militer di tahun 2006 dan di jatuhi hukuman penjara karena terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2008 . Tapi dari basisnya di Dubai Thaksin masih dapat mempertahankan pengaruh besar atas politik Thailand. Aksi protes tersebut di pimpin oleh Suthep Thaugsuba mantan deputi perdana menteri yang telah melakukan tuduhan pembunuhan atas perannya dalam tindakan kekerasan terhadap pendukung pro Thaksin di tahun 2010 ⁶³ .

⁶³. Andrew Buncobe “ 'Shutdown Bangkok': Thai protesters block roads to force resignation of Prime

Pertengahan bulan Desember 2013 peran militer kembali ketika para pemimpin angkatan bersenjata melakukan pertemuan dengan pemimpin mereka . Suthep protes dengan tujuan menemukan sebuah resolusi terdapat gejolak suatu negara dan belum diketahui juga apakah pertemuan tersebut meningkatkan pergeseran sikap militer dari netralitas guna mendukung partai oposisi . Pada 14 Desember 2013 militer telah mempertahankan posisi netralnya dalam sebuah forum publik termasuk para pemimpin angkatan bersenjata lainnya . Pemimpin oposisi yaitu Suthep mencoba untuk menarik intervensi militer dengan mengatakan adanya tindakan yang di lakukan di masa lalu . Pada 21 Desember 2013 Yingluck Shinawatra menjabat sebagai Perdana Menteri sementara dan mengutus juru kunci untuk menyerukan semua partai politik guna berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan menjanjikan sebuah reformasi . Seruan tersebut muncul ketika oposisi mengumumkan bahwasannya akan memboikot pelaksanaan pemilihan umum itu. Abhisit Vejjajiva selaku pemimpin partai oposisi utama pada Partai Demokrat menjelaskan bahwa politik Thailand berada pada tahap gagal . Rakyat Thailand pun telah kehilangan sebuah kepercayaan akan sistem demokrasi negara itu . Tidak jelasnya penolakan terhadap proses demokrasi maka dia juga mendukung gagasan Suthep mengenai “Dewan Rakyat” yang tidak terpilih guna menjalankan suatu negara . Protes anti

Minister” diakses dari <https://www.independent.co.uk> pada 26 Agustus 2018 pukul 19.00

pemerintahan terus berlangsung di minggu terakhir bulan Desember 2013. Konflik itu berlangsung dengan adanya kekerasan berbalik dengan beberapa pengunjuk rasa yang melemparkan batu lalu polisi segera menanggapi dengan menyemprotkan gas air mata kepada mereka. Keadaan konflik itu menyebabkan kematian beberapa orang dan melibatkan perwira polisi . Peringatan yang diberikan oleh Komisi pemilihan bahwa kandidat berisiko saat kampanye sedang berjalan . Pemerintah mengatakan pemilu harus terlaksana dikarenakan parlemen sebelumnya sudah dibubarkan⁶⁴.

Pada tahun 2014 diawali dengan adanya aksi protes politik dengan skala besar dan terus berlanjut oleh Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) sejak November 2013. Pada dasarnya aksi protes tersebut dapat melumpuhkan negara dengan menutup badan pemerintah dan memblokir jalan utama di Thailand . Aksi protes tersebut di pimpin oleh Suthep Thaug Suban merupakan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat . Komite yang di tunjuk oleh Suthep Thaug mendapatkan pengikut dengan jumlah besar terdiri dari kelas menengah di Bangkok , kota – kota provinsi termasuk bagian selatan dan kubu Demokrat . Dari sekian banyak pengikut tetapi sebagian besar dari mereka dapat dianggap sebagai pendukung kaos kuning meskipun sedang tidak mengenakan kaos kuning . Sebagian besar lembaga pemerintah

⁶⁴ “ Thailand review 2018” diakses dari <http://www.countrywatch.com> pada 9 Agustus 2018 pukul 09.00.

dilarang masuk dan pejabat pun di minta tidak untuk datang bekerja hal itu merupakan bentuk protes terhadap adanya dugaan korupsi yang di lakukan oleh Yingluck Shinawatra. Demonstrasi yang terjadi di Thailand ini di picu adanya penolakan publik atas RUU amnesti dengan cakupan luas lalu disahkan oleh parlemen . Parlemen itu dikendalikan oleh Partai Pheu Thai di bulan Oktober 2013. RUU tersebut akan memberikan ampunan kepada semua pihak dan orang-orang yang terlibat di dalam krisis politik dan kekerasan di masa lalu. Pengampunan tersebut tidak hanya diberikan kepada Thaksin melainkan para pemimpin kaos merah dan pemimpi Demokrat yang terlibat dalam penindasan militer 2010. Penindasan yang terjadi pada tahun 2010 itu mengakibatkan sekitar 100 orang tewas dan sebagian besar dari mereka adalah kaos merah . Hal itu menyebabkan beberapa pendukung kaos merah tidak setuju akan RUU amnesti . Pada akhirnya Partai Pheu Thai menarik kembali RUU itu dan Suthep pun mengambil keuntungan dari momentum guna melakukan protes berskala luas yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Yingluck⁶⁵ . Gerakan anti pemerintah (PDRC) yang didukung oleh beberapa keluarga terkaya dan menunjuk seorang Perdana Menteri untuk mencoba memaksa Yingluck keluar dari negara Thailand .Mahkamah Konstitusi pun mendukung gerakan aksi protes yang

⁶⁵ . Keyes, Charles . Democracy Thwarted : The crisis of political authority in Thailand .ISEAS Publishing INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES. Hal 13-14. Singapore

memimpin kampanye guna memblokir pemilihan umum tersebut mengatakan bahwa para pengunjuk rasa memiliki hak untuk menggunakan hak serta kebebasan mereka . Ketika gerakan anti pemerintah berupaya menyemangati keputusan tersebut tetapi para ahli hukum merasa putus asa ⁶⁶.

Di provinsi bagian timur laut Khon Kaen merupakan kubu dari Shinawatra dan pemimpin gerakan kaos merah tersebut mengatakan bahwa para pendukungnya merasa frustrasi . Beberapa pendukung di luar pengadilan sedang membawa mawar sedangkan yang lainnya mengenakan sarung tangan putih dengan kata “ Cinta “ ⁶⁷. Front Bersatu untuk Demokrasi melawan Kediktatoran sering disebut dengan kaos merah . Kaos merah merupakan pro terbesar dalam gerakan demokrasi dalam sejarah negara Thailand sekaligus aktivis sosial yang percaya bahwa rakyat layak mendapatkan politik serta menjamin mereka atas hak asasi manusia . Kaos merah merupakan pekerja yang tidak terdaftar , petani ,orang miskin sekaligus bagi

⁶⁶ . “ Yingluck Shinawatra’s supporters ready to demonstrate in the event of guilty verdict but Thai military remains firmly in charge” diakses dari <https://www.scmp.com> pada 22 Agustus 2018 pukul 19.00.

⁶⁷ . “ Thailand deploys 4,000 police as Yingluck supporters gather ahead of court ruling” diakses dari <https://www.todayonline.com> pada 23 Agustus 2018 pukul 00.00 .

mereka yang tidak memenuhi persyaratan untuk tingkat kesejahteraan dan karyawan industri ⁶⁸. Kaos merah merupakan pendukung dari Shinawatra dan berpusat di sekitar Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD). Selain itu mendapatkan dukungan dari beberapa akademisi terkemuka dan aktivis sosial . UDD dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan kekuatan melawan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) anti Thaksin . Kaos merah juga meminta mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk mengundurkan diri . Mereka mengatakan bahwasannya kampanye adalah bentuk pertarungan melawan dominasi politik dari elit yang tidak terpilih termasuk royalis , pebisnis papan atas , peradilan dan jenderal senior ⁶⁹ . Sejauh ini kaos merah bersekutu dengan Partai Thaksin Pheu Thai telah menghindari konfrontasi para demonstran anti pemerintah selain itu mereka juga memiliki banyak sekali pengalaman . Kaos merah juga melakukan latihan militer guna bentuk persiapan . Letnan Kolonel Supon Fumuljaroen mantan kepala polisi sekaligus pejabat UDD mengatakan bahwa “kami tidak ingin memberi

⁶⁸ . Chinakai , Ekapit . Non Naprathansuk . 2017 .
“ A Comparison of Political Movements in Thailand from 2005- 2013: Case Study on People’s Alliance for Democracy (PAD), the People’s Democratic Reform Committee (PDRC), and United Front for Democracy against Dictatorship (UDD)

⁶⁹ . “ Profile: Red Shirts” diakses dari <https://www.aljazeera.com> pada 23 Agustus 2018 pukul 00.30 .

dalih karena hampir setiap hari mereka menyerukan militer untuk keluar⁷⁰.

Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada 26 Januari 2014 dan berjalan dengan lancar di kubu partai yang memerintah di provinsi bagian utara. Selama berjalannya pemilihan umum itu para pemrotes anti pemerintah mengganggu sebagian besar suara di kota Bangkok. Kota Bangkok terkena dan terpengaruh atas aksi protes hanya lima dari 50 TPS yang berhasil di buka. Para pemilih berani melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan nasional pada 2 Februari 2014. Para pengunjung rasa memaksa untuk dibataalkannya pemilihan umum di 9 dari 76 provinsi dan 4 dari 50 distrik di Bangkok. Parlemen membutuhkan sekitar 95 persen kursi untuk diisi guna mencapai forum dan perdana menteri⁷¹. Para demonstran pun datang untuk fokus pada tindakan korupsi yang di lakukan oleh Yingluck Shinawatra terutama masalah skema beras. Akibat dari adanya skema beras itu diduga mengalami kerugian sebanyak 600 miliar baht (US\$ 20 miliar) dan Thailand di copot sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia karena dianggap terlalu mahal.

⁷⁰ . Andrew Buncombe.” Thailand protests: Meet the 'Red Shirts', the pro-government Shinawatra supporters of the north” diakses dari <https://www.independent.co.uk> pada 23 Agustus 2018 pukul 01.00 .

⁷¹ . “ Thailand - Politics - 2011-20xx” diakses dari <https://www.globalsecurity.org> pada 10 Agustus 2018 pukul 08.00 .

Sebelumnya pemerintah setuju akan membeli beras dari para petani dengan tarif yang cukup jauh di luar harga pasar global . Pemerintah pun tidak dapat menjual beras yang dibelinya dengan harga tinggi akhirnya mereka menanggung kerugian tersebut dan gagal membayar para petani .

Kudeta militer terjadi pada bulan Mei 2014 yang mana merupakan serangkaian peristiwa politik. Peristiwa politik itu berawal dari terjadinya demonstrasi di pusat kota Bangkok. Demonstrasi terjadi pada masa pimpinan perdana menteri Yingluck Shinawatra yang mana saat itu telah mencegah diadakannya pemilihan umum pada bulan Februari 2014. Negara Thailand pun tersiksa akan gejolak yang sedang terjadi karena aksi protes terhadap pemerintahan (kaos kuning) pada gilirannya mobilisasi itu di picu oleh demonstrasi dengan skala besar yang di lakukan demi pemerintahan (Kaos merah) . Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Mahkamah konstitusi pemilihan umum bulan Februari 2014 di batalkan .Pembatalan tersebut di lakukan ke Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan Konstitusi 2007. Konstitusi 2007 menetapkan bahwa pemilihan umum harus di lakukan di waktu yang sama di seluruh penjurur negara Thailand . Mahkamah konstitusi pun memaksa perdana menteri Yingluck Shinawatra berserta sembilan menteri untuk mengundurkan diri tepatnya tanggal 7 Mei 2014 sebelum terjadinya demonstrasi. Setelah pengunduran diri yang di lakukan oleh Yingluck akhirnya para menteri lainnya menunjuk wakil perdana menteri Niwatthamrong Boonsongpaisan .

Penunjukan wakil perdana menteri Niwatthamrong Boonsongpaisan sebagai perdana menteri sementara Peristiwa politik pun tidak hanya berhenti di situ saja proses pun berlanjut tepatnya pada tanggal 22 Mei Militer mengambil alih kekuasaan guna memulihkan ketertiban⁷² .

Pada tanggal 22 Mei 2014 Jenderal Prayuth Chan ocha sebagai kepala dari Royal Thai mengumumkan sebuah kudeta untuk menyelesaikan krisis politik berupa proses pengusuran pemerintahan di bawah pimpinan Partai Pheu Thai . Pengusuran tersebut di lakukan karena telah pindahnya pemerintahan Pheu Thai sejak bulan November 2013 melalui aksi protes . Akibat dari aksi protes tersebut tentara bergerak cepat dengan mengeluarkan sebuah deklarasi darurat militer pada tanggal 20 Mei . Prayuth selaku kepala dari junta militer tersebut memanggil politisi senior ke sebuah konferensi yang diadakan pada 21 Mei Konferensi yang di hadiri oleh Prayuth beserta politisi senior itu ditujukan secara pura-pura dalam menyelesaikan perpecahan politik di Thailand. Pertemuan itu dianggap gagal dalam membuat suatu kemajuan akhirnya militer mengambil alih kendali pada 22 Mei 2014 dengan membentuk Dewan perdamaian dan ketertiban nasional (NCPO) . Dewan perdamaian dan ketertiban nasional itu di pimpin oleh Prayuth Chan ocha .

Saat itu juga 22 Mei 2014 terjadi krisis politik susulan yang melanda negara Thailand sekitar enam bulan belakangan .Krisis politik

⁷² . “ kudeta militer di Thailand” diakses dari <http://www.bbc.com> pada 28 januari 2018 pukul 23.06.

yang berawal dari unjuk rasa di ibukota Thailand yaitu Bangkok tahun 2013. Beranggapan bahwa pemerintahan yang di pimpin oleh Yingluck Shinawatra dikendalikan oleh kakaknya . Kakak dari Yingluck Shinawatra yaitu Thaksin Shinawatra tersebut pernah menjabat sebagai perdana menteri di Tahun 2006 .Thaksin Shinawatra sempat mengasingkan diri keluar negeri setelah penggulingan dalam kudeta militer tahun 2006.Upaya yang di lakukan oleh Yingluck dengan menggelar pemilu dini tidak berhasil memecahkan kekacauan politik setelah kubu oposisi memboikot pemungutan suara.

NCPO menyatakan pada 23 Mei 2014 akan di lakukan reformasi nasional “ekonomi, sosial dan politik” sebelum dilaksanakan pemilihan umum . Adanya reformasi nasional maka dari itu Dewan Reformasi dan Majelis Nasional akan di bentuk guna bekerja . Dewan reformasi juga ingin menyelesaikan permasalahan diantaranya masalah proyek sumpah beras dan akan di laksanakan proyek pembangunan jalan yang berlokasi di kedua tepi sungai Chao Phraya . Dimana proyek pembangunan jalan tersebut awalnya di prakarsai oleh PTP di tahun 2012 dan merupakan bagian dari proyek pengendalian banjir . Jenderal Prayuth Chan -Ocha pun mengatakan bahwa akan menjalankan negara Thailand dimana situasi sampai membutuhkan sebuah pemerintahan sementara pasca terjadinya kudeta militer . Prayuth Chan -Ocha mengambil keputusan yaitu akan menggunakan komando militer dan sistem kontrol yang di yakinin akan mengembangkan negara Thailand. NCPO mengumumkan bahwa

pemimpinnya akan menentukan sebuah kebijakan administrasi nasional baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Pada administrasi nasional terdapat dua tingkatan administrasi meskipun demikian sekretaris tetap bertindak sebagai Menteri. Semua pekerjaan yang bertindak harus diperiksa dan disetujui oleh komite yang diberi tugas. Setiap tugas yang berada di luar otoritas mereka harus di teruskan kepada kepala NCPO yaitu Prayuth Chan-Ocha guna disetujui. Hal tersebut berdasarkan aturan lama karena Prayuth merupakan orang yang mempunyai kekuasaan administratif mutlak dan mencoba untuk tidak menghindari penggunaannya. NCPO memiliki tujuh tim koordinasi di dalamnya terdiri dari polisi, militer dan warga sipil. Mereka tadi bekerjasama untuk memastikan adanya transparansi apabila terjadi suatu masalah dan apabila tidak berpengaruh maka tidak perlu diperiksa tetapi cukup ditinjau.

Penegakan terhadap undang-undang masih sangat ketat seperti sebelumnya dan mungkin akan lebih jika terdapat suatu kekerasan dan perlawanan. Apabila situasi membaik lebih cepat dari waktunya maka langkah itu secara bertahap akan berkurang. NCPO tidak ingin ada masalah dalam menjalankan bisnis disektor apapun. Mengenai peraturan diadakannya jam malam terdapat pengecualian apabila terdapat suatu hal mendesak maka dapat memberi tahu pihak berwenang. NCPO pun sudah menyediakan semua fasilitas transportasi dan bahan bakar dan telah mengadakan pertemuan serta adanya tanggung jawab yang ditugaskan. Warga di

perbolehkan untuk berpergian setelah jam malam antara lain dokter baik merawat ataupun pergi ke rumah sakit dengan memberi tahu kepada lembaga negara . Selain itu karyawan yang bekerja pada shift malam juga dapat memberi tahu lembaga negara . Mereka diberikan tugas tersebut akan mengontrol dan merawat orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum , menggunakan senjata perang ,menolak atau melakukan apapun berpengaruh terhadap hukum serta ketertiban⁷³ .

Pada tanggal 24 Mei 2014 Jenderal Prayuth Chan ocha sebagai kepala dari Royal Thai mengumumkan sebuah kudeta untuk menyelesaikan krisis politik berupa proses pengusuran pemerintahan di bawah pimpinan Partai Pheu Thai . Pengusuran tersebut di lakukan karena telah pindahnya pemerintahan Pheu Thai sejak bulan November 2013 melalui aksi protes . Akibat dari aksi protes tersebut tentara bergerak cepat dengan mengeluarkan sebuah deklarasi darurat militer pada tanggal 20 Mei . NCPO berhasil merebut kekuasaan pada tahun 2014 dengan alasan ancaman terhadap kekerasan terus berlanjut setelah berbulan -bulan terjadinya protes terhadap perdana menteri Yingluck Shinawatra .Yingluck sendiri terpilih pada bulan juli 2011 yang di usung oleh partai Pheu Thai. Banyak yang memuntut untuk melakukan penggulingan terhadap Yingluck Shinawatra melihat kudeta

73 .“ Transcript of coup maker Gen Prayuth's statement after royal endorsement, inclu Q&A w/ reporters” diakses dari <https://prachatai.com> pada 18 Juli 2018 pukul 12.00.

militer tersebut sebagai langkah penting dalam memberantas korupsi. Kudeta militer dalam rangka penggulingan Yingluck mereka sebut dengan kediktatoran⁷⁴ .

C. Pasca terjadinya kudeta militer

Selama satu tahun pasca terjadinya kudeta dari 22 Mei 2014 hingga 22 Mei 2015 setidaknya kurang lebih 751 orang telah dipanggil oleh NCPO. Panggilan itu dilakukan melalui berbagai cara antara lain menyiarkan nama-nama di radio , Tv serta saran informal lainnya . Relatif mereka yang berafiliasi dengan Partai Pheu Thai atau Kaos merah di panggil secara proporsional daripada kelompok lainnya . Pemanggil tersebut setidaknya 278 dari mereka adalah sementara dan 41 orang yang berafiliasi dengan Partai Demokrat atau Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC). Selain itu kurang lebih 176 akademisi ,akivis serta mahasiswi , penulis dan jurnalis pun di panggil oleh NCPO. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menandatangani formulir rilis yaitu mencegah supaya tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik apapun ⁷⁵ . Junta militer telah menangkap 21 orang di bagian utara khon kaen yang mereka curigai sebagai militan dari kaos merah dan terdapat bukti lain di antaranya tiga

74 . “Anti coup students hold posters dedicated to the third anniversary of a military coup during a demonstration” diakses dari www.hrw.org pada 30 Januari 2018 pukul 20.15.

75 . “ 364 days after the coup: Report on the situation of freedom of expression in Thailand ” diakses dari <https://freedom.ilaw.or.th> pada 1 Februari 2018 pukul 08.00

granat ,bom asap,amunisi dan tabung gas. Media masa Thailand juga melaporkan adanya peningkatan terhadap kekerasan di bagian wilayah selatan negara tersebut dengan puluhan pengeboman yang telah menewaskan dua orang serta puluhan orang lainnya mengalami luka. Aksi protes kepada anti kudeta telah banyak direncanakan hal itu menjadi masalah serius bagi pemimpin jenderal Prayuth Chan-Ocha yang akan merebut kekuasaan dari pemerintahan Thailand. Charupong Ruangsuwan sebagai pihak dari Ying pheu (Yingluck) mengatakan bahwasannya dia tidak akan menyerah terhadap tokoh militer yang sudah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih. Di tengah kecaman internasional akibat pengambil alihan AS menyebabkan batalnya latihan militer dengan negara Thailand . Diantara para pejabat tersebut dianggap telah melayani pemerintah yang di gulingkan melalui kudeta dan dibersihkan dari jabatan mereka yaitu kepala polisi nasional Adul Saengsingkaew , sekretaris tetap pertahanan Nipat Thonglek serta Tarit Pengdith sebagai kepala Departemen Investigasi Khusus,biro kepolisian Thailand. Sang Raja Bhumibol Adulyadej telah mengakui atas peristiwa kudeta militer guna menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Pengambil alihan kekuasaan pun terjadi ketika kecemasan atas umur Sang Raja Bhumibol menginjak usia 86 tahun dan saat itu juga sedang dalam keadaan sakit. Kudeta dilihat dari bagian upaya depalan puluh tahun oleh sebuah

organisasi elit Bangkok guna melawan Thaksin Shinawatra yang sangat kuat secara politikk⁷⁶.

Para mantan anggota pemerintahan yang di pecat mereka pun menyerahkan diri kepada junta militer baru . Saat itu tentara dengan paksa membubarkan ratusan aktivis anti kudeta yang menentang larang sebuah pertemuan berskala besar untuk mengadakan aksi protes guna merebut kekuasaan dari tentara . Junta tetap memegang kendali dengan memanggil lebih dari 100 tokoh politik paling atas. Para pemerintah yang di gulingkan saat aksi kudeta itu masuk kedalam daftar nama dimana tidak boleh meninggalkan negara Thailand . Di antara daftar nama tersebut terdapat nama perdana menteri Yingluck Shinawatra yang di gulingkan akibat adanya nepotisme oleh Mahkamah Konstitusi. Niwattumrong Boonsongpaisan merupakan pengganti sementara setelah Yingluck . Prayuth membenarkan bahwa kudeta itu merupakan langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas di tengah meningkatnya kekejaman kekerasan dengan putusan pengadilan kontrovesional telah menyebabkan pemerintah tidak mempunyai kekuatan⁷⁷.

Militer telah mendeklarasikan Hukum Darurat Militer secara nasional pada 20 Mei 2014 dibawah kekuasaan UU Darurat Militer

76 . Lindsay Murdoch . “Thailand coup: Junta disbands Senate, tightens grip across country ” diakses dari <https://www.smh.com.au> pada 1 Februari 2018 pukul 09.00

77 . “Thailand coup leaders hold ex-PM Yingluck Shinawatra” diakses dari <http://www.cbc.ca> pada 22 Juli 2018 pukul 2.28 .

B.E 2457(1914)(MLA). Darurat militer tetap berlaku secara nasional semenjak saat itu dikarenakan telah diberlakukannya di sekitar provinsi perbatasan selatan Thailand selama kurang lebih sembilan tahun dan hampir tersebar di seluruh distrik . Pendeklarasian mengenai diadakannya jam malam yaitu dari jam 10 – 5 pagi itu di cabut secara nasional pada 13 Juni 2014. NCPO pun membenarkan mengenai penggunaan Hukum Darurat Militer secara terus-menerus . Penggunaan Hukum Darurat Militer digunakan untuk menggagalkan kerja dari NCPO di markas besar tentara Kerajaan Thailand pada 17 Juli 2014. Letnan Jenderal Chatchalerm Chalermsook selaku wakil kepala staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengatakan kepada pihak Amnesty internasional bahwasannya undang -undang Darurat Militer tetap di perlukan guna adanya keamanan nasional⁷⁸ .

Peta jalan milik Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) menetapkan sejumlah tujuan dalam tiga tahap yaitu :

- 1) Terdapat penekanan pada pembangunan dan memelihara perdamaian serta ketertiban
- 2) Melibatkan penyusunan konstitusi sementara yang saat itu juga pemerintahan dibentuk bersamaan dengan dewan reformasi.

⁷⁸. “Thailand :Attitude Adjustment 100 days under martial law” diakses dari <https://www.amnesty.org.uk> pada 23 Juli 2018 pukul 00.15.

- 3) Fase terakhir ini melibatkan pemilihan umum dan kembali ke pemerintahan yang demokratis.

Sekarang ini NCPO telah mengelola negara Thailand selama kurun waktu beberapa minggu dengan memberi waktu pengamatan yang cukup lama guna menilai bagaimana upaya sejauh ini. Beberapa penilaian pun cukup puasa meskipun yang lain masih ingin melihat hasil lebih baik terutama di bidang ekonomi . Nampaknya tingkat normalitas akan segera kembali pada lanskap perpolitikan . Banyak yang mengawasi guna melihat apakah terdapat perebutan kekuasaan antara perdana menteri baru dan Jenderal Prayuth Chan-Ocha selaku pemimpin NCPO . Mengenai model majelis legislatif yang mana akan di adopsi oleh NCPO sampai saat itu belum di ketahui . Thailand sendiri telah memiliki lima majelis seperti itu di masa lalu . Pada tahun 1972 Majelis nasional yang pertama di bentuk selama era Marsekal Lapangan Thanom kittikachorn dengan jumlah anggota yaitu 299 orang⁷⁹ .

Pada 21 Agustus 2014 , 191 anggota Dewan Legislatif Nasional akhirnya menyetujui Jenderal Prayuth Chan-Ocha sebagai perdana menteri baru sementara mengizinkan untuk mempertahankan kepemimpinan dari otoritas militer . Tiga bulan setelah kudeta militer 22 Mei 2014

⁷⁹ . Attayuth Bootsriboom. “ NCPO's roadmap throws up a number of possibilities” diakses dari <http://www.nationmultimedia.com> pada 23 Juli 2018 pukul 01.00

junta pun terus melakukan tindakan keras terhadap mereka yang melaksanakan haknya serta kebebasan fundamental dan tidak membuat kemajuan nyata menuju pemulihan pemerintahan demokratis . Di bawah konstitusi sementara yang di umumkan pada 22 Juli 2014 junta militer menciptakan sebuah sistem politik tertutup dan tidak demokratis . NCPO mengisi Majelis Legislatif Nasional melalui personel militer serta yang lain dikenal dekat dengan junta . Sejak pembentukan Majelis tampaknya berfungsi sebagai badan stempel karet untuk NCPO daripada menetapkan pemeriksaan terhadap kekuatan eksekutif . Sejak konflik kudeta 22 Mei 2014 NCPO telah memberlakukan penyensoran secara luas . Selama tiga bulan di bawah kekuasaan militer junta pun terus menunjukkan penghinaan terhadap hak – hak dasar serta kebebasan ⁸⁰ .

Dewan yang didukung oleh militer Thailand sendiri telah menolak rancangan konstitusi kontroversial akibatnya terjadinya adanya penundaan pemilihan dan memperpanjang kekuasaan para jenderal . Para jenderal militer tersebut yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer di tahun 2014. Junta militer pun sudah memilih perancang yang di pilih sendiri dikenal sebagai Dewan Reformasi Nasional guna menulis konstitusi baru . Ketentuan itu menjadi perdebatan yang

80 . “Thailand: Junta Leader Named Prime Minister” diakses dari <https://www.hrw.org> pada 29 Juli 2018 pukul 00.06

menciptakan panel beranggotakan 23 orang termasuk tokoh militer serta polisi . Dewan Reformasi Nasional memilih 135 penantang ,105 pendukung dan 7 abstain lalu bertemu dengan oposisi yang kuat di seluruh perpecahan politik di Asia Tenggara . Para pengamat mengatakan bahwa pemilihan umum tidak dapat di laksanakan hingga tahun 2017 sementara piagama baru di tulis dan disetujui. Proses drafting akan di mulai lagi dengan junta memilih komite baru yang beranggotakan 21 orang . Draf tersebut muncul bertujuan untuk menghentikan kembalinya mantan perdana menteri Thaksin shinawatra . Rancangan itu akan memungkinkan non anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa hal itu dapat memperpanjang masa jabatan Prayuth Chan Ocha ⁸¹ .

Majelis Legislatif Nasional (NLA) yang dibentuk oleh junta sekitar setengah dari anggotanya aktif serta mantan perwira menyetujui sebuah undang-undang Referendum pada 7 April 2016 dengan tanggal efektif 23 April 2016 . Badan wewenang pun sering menggunakan Undang-undang itu guna menahan dan menagih secara sewenang-wenang . Pada 29 April 2016 , komisi pemilihan mengeluarkan sebuah daftar dos and don'ts yaitu seperangkat aturan guna mengatur perilaku

81 . “ Thailand elections delayed as draft constitution is rejected“ diakses dari <https://www.theguardian.com> pada 23 Juli 2018 pukul 09.00

individu serta kelompok yang harus di ikuti selama menjelang referendum ⁸². Konstitusi baru diadopsi oleh pemilih dalam referendum pada 7 Agustus 2016 melalui konteks dimana pemerintah memberlakukan larangan untuk kelompok oposisi dari kampanye terbuka guna memantau jalanya referendum . Ketika terjadi referendum terdapat sekitar enam puluh persen memilih memberikan dukungan dan hanya lima puluh sembilan persen memilih sebuah konstitusi baru . Konstitusi baru tersebut memberikan sebuah kekuatan cukup besar kepada badan – badan yang tidak terpilih ,melemahkan partai politik dan memperkuat pengaruh militer di dalam politik . Pada bulan April 2017 konstitusi baru di ratifikasi oleh Raja Maha Vajiralongkorn yang mana telah naik tahta setelah kematian ayahandanya yaitu Raja Bhumibol Adulyadej

⁸² . ” Roadblock to democracy Military repression and Thailand’s draft constitution “ dikases dari <https://www.fidh.org> pada 23 Juli 2018 pukul 09.30.